



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
**UNIT KERJA** : KECAMATAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMRI MUSTARI**
2. Jabatan : **CAMAT**
3. NHK : **424623**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.650.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 660 m2/208 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
2. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
3. Bangunan Seluas 126 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , Rp. 300.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA PALOPO , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>205.000.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.5 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>17.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>981.645</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>300.000.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.172.981.645</b>



III. HUTANG

Rp. 465.054.447

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.707.927.198

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.